

ANALISIS KUALITAS INFRASTRUKTUR SEBAGAI URUSAN PRIORITAS DALAM RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NGAWI

¹Achmad Miftahul Khoiri, ²Ima Kumalasari, ³Durratun Nashihah

¹Senior Researcher at SmartID Indonesia, Malang, East Java Indonesia

²Center of Policy and Development Studies, ³Center of Policy and Development Studies
e-mail: imakumala18@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.58411/pangripta.v6i2.220>

Abstrak: Permasalahan pembangunan infrastruktur masih menjadi gap expectation antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan. Pada kenyataannya, kondisi pembangunan infrastruktur di Indonesia terutama infrastruktur jalan masih menyisakan adanya defisit infrastruktur yang cukup besar, pentingnya pembangunan infrastruktur tertuang dalam Peraturan Daerah melalui rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengeksplorasi sejauh mana kualitas infrastruktur sebagai urusan prioritas tertuang dalam rencana kerja pemerintah daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif melalui systematic literature review. Hasil dalam penelitian ini menggarisbawahi (1) determinan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan dipengaruhi oleh sinergitas program prioritas dalam penyusunan RKPD suatu daerah. (2) implementasi musrenbang dalam penentuan prioritas dokumen RKPD di Kabupaten Ngawi tidak menggunakan forum musrenbang dalam menetapkan program prioritas daerahnya, tetapi berasal dari arahan Bupati yang kemudian disesuaikan dengan kegiatan dari OPD terkait sebagai leading sector.

Kata kunci: infrastruktur, pembangunan daerah, program prioritas, RKPD

Abstract: *The problem of infrastructure development is still the expectation gap between the development performance currently achieved and that planned. In reality, the condition of infrastructure development in Indonesia, especially road infrastructure, still leaves a fairly large infrastructure deficit. The importance of infrastructure development is stated in Regional Regulations through the draft Regional Medium Term Development Plan (RPJMD) in accordance with Law Number 25 of 2004 concerning the development planning system. national. This research aims to analyze and explore the extent to which infrastructure quality is a priority issue contained in regional government work plans. The method used in this research is a qualitative approach through a systematic literature review. The results of this research highlight (1) the determinants of the quality of road and bridge infrastructure are influenced by the synergy of priority programs in preparing the RKPD of a region. (2) the implementation of musrenbang in determining priorities for RKPD documents in Ngawi Regency does not use the musrenbang forum in determining regional priority programs, but comes from the Regent's direction which is then adjusted to the activities of the relevant OPD as the leading sector.*

Keywords: *regional development infrastructure, priority programs, RKPD.*

PENDAHULUAN

Studi-studi terdahulu yang membahas tentang pembangunan infrastruktur dalam agenda rencana kerja pemerintah daerah dalam beberapa tahun terakhir didominasi oleh topik bahasan terkait pengaruhnya terhadap ekonomi, determinan yang mempengaruhi infrastruktur dan evaluasi dalam kesesuaian implementasi pembangunan infrastruktur (Tahwin, 2018; Heldan *et al*, 2021; Fauziah &

Juliprijanto, 2021; Husen & Barayanan, 2021; Soliha, 2022; Yunasri, 2022). Studi lain juga menunjukkan pentingnya pembangunan infrastruktur dalam pembangunan sosial-ekonomi. Sebagaimana dalam Prasetyo *et al* (2018) yang mengkonfirmasi bahwa ketersediaan infrastruktur telah mempengaruhi sistem sosial dan ekonomi dalam masyarakat Indonesia. Senada dengan hal tersebut Decker *et al* (2003) dan Calderon & Serven (2004)

turut mengafirmasi bahwa peningkatan kapasitas infrastruktur berdampak positif terhadap distribusi pendapatan dan perekonomian daerah maupun nasional.

Di lain hal, beberapa negara berkembang menghabiskan cukup banyak anggaran dalam mempercepat infrastruktur daerahnya (Baum-Snow et al, 2017). Salah satu negara sebagaimana dimaksud adalah Indonesia, daerah-daerah di Indonesia menindaklanjuti mengenai pentingnya pembangunan infrastruktur yang tertuang dalam Peraturan Daerah melalui rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional.

Infrastruktur menjadi lokomotif dan fondasi bagi pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan mempunyai perkembangan yang paling pesat dan mendominasi jika dibandingkan dengan infrastruktur jenis lainnya (Gibbons et al.,2019). Namun kondisi pembangunan infrastruktur di Indonesia terutama infrastruktur jalan masih menyisakan adanya defisit infrastruktur yang cukup besar, baik dalam hal ketersediaan maupun kualitasnya (Husen & Barayanan, 2021). Lebih lanjut Husen & Barayanan (2021) memaparkan kondisi infrastruktur di Indonesia yang kurang baik sehingga menghambat pencapaian potensi pertumbuhan ekonomi sebesar 7-8% per tahun.

Selain itu, keberadaan infrastruktur yang memadai turut menjadi salah satu pendukung kelancaran daya saing daerah. Kualitas sistem infrastruktur yang baik menunjang daya saing daerah dalam hubungannya dengan ketersediaan fasilitas untuk mendukung aktivitas ekonomi daerah di berbagai sektor di daerah dan antar wilayah. Keberhasilan pembangunan daerah

dilandasi oleh daya saing daerah yang *sustain* dan *resilience* yang selanjutnya mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Data pada Tabel 1 menunjukkan ketercapaian pembangunan daerah pemerintah Kabupaten Ngawi dalam 5 tahun terakhir.

Tabel 1. Infrastruktur Pendukung Daya Saing Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2016-2020

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jembatan yang terbangun	Unit	2	1	3	4	3
Panjang jalan yang terbangun	Km	26.7	28.2	28	27.5	24.5
Persentase jalan dalam kondisi baik	%	54,7	58.9	60.9	66.2	67.5
Persentase jembatan dalam kondisi baik	%	94.8	94.9	96.2	96.2	91.5

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2021

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir terlihat bagaimana keseluruhan capaian indikator mengalami peningkatan yang fluktuatif dari tahun 2016-2020 di Kabupaten Ngawi. Sebagaimana terlihat bahwa jalan dalam kondisi baik hanya sebesar 54,7% di tahun 2016 dan mengalami peningkatan seiring berjalannya waktu menjadi 67,5% pada tahun 2020. Kondisi ini menjadi menarik ketika pembangunan jembatan dan jalan memiliki persentase yang cukup bertolak belakang karena masih adanya infrastruktur jalan menuju Kawasan strategis Kabupaten Ngawi yang kondisinya belum memadai.

Oleh karena itu, permasalahan pembangunan infrastruktur menjadi *gap expectation* antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta apa yang ingin dicapai dimasa mendatang dengan kondisi real saat perencanaan sedang dibuat. Mengingat infrastruktur jalan mempengaruhi proses produksi, jasa

sampai pengembangan wilayah dalam rangka percepatan pertumbuhan wilayah regional, perdesaan dan perkotaan (Hadi *et al.*, 2021). Meskipun demikian, terkadang kualitas infrastruktur pembangunan jalan sebagai urusan prioritas pemerintah daerah masih belum menjadi hal penting yang diulas dalam berbagai penelitian. Sehingga berdasarkan uraian tersebutlah, peneliti menjadi menarik untuk menganalisis kualitas infrastruktur sebagai urusan prioritas dalam rencana kerja pemerintah daerah Kabupaten Ngawi.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *systematic literature review*, hal ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan suatu deskripsi atau gambaran yang luas mengenai kualitas infrastruktur dalam rencana kerja pemerintah daerah. Studi-studi terdahulu telah banyak membahas terkait dengan penggunaan metode *systematic literature review* sebagai suatu alat analisis tertentu (Page *et al.*, 2021; Snyder, 2019; Xiao & Watson, 2019). Adapun dalam penelitian ini, peneliti berupaya memilih dan mengumpulkan data dengan menggunakan PRISMA model. Lebih lanjut peneliti menggunakan prosedur PRISMA yang digunakan oleh Selcuk (2019). Sementara pada penulisan ini peneliti akan membatasi pencarian artikel hanya pada rentang waktu tahun 2017 sampai 2022 dari basis data *google scholar* berdasarkan topik penelitian.

Selanjutnya tahapan yang dilakukan dalam proses pencarian artikel adalah sebagai berikut: Pertama, Identifikasi, identifikasi artikel didasarkan pada pencarian jurnal yang digunakan yaitu melalui basis data *Google Scholar* dari *software Publish or Perish* dengan menggunakan kata kunci sebagai basis pencarian. Kata kunci yang dipakai adalah “Infrastruktur jalan dan

jembatan”, “Rencana Kerja Pemerintah Daerah”, “Ngawi”. Pencarian dilakukan dengan pembatasan tahun terbit, yaitu dari rentang tahun 2017 sampai 2022.

Berdasarkan filter tersebut ditemukan sebanyak 27 artikel. Selanjutnya tahap kedua, yaitu Skrining (*Screening*), proses ini memungkinkan peneliti untuk menyaring beberapa artikel berdasarkan relevansi dengan topik penelitian. Terdapat beberapa tahapan *screening* yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu melakukan kriteria inklusi dan eksklusi. Kriteria inklusi dalam penelitian ini adalah: artikel terbit dalam 5 tahun terakhir (2017-2022), tipe dokumen berupa artikel, artikel dapat diakses bebas, fokus dan desain penelitian sesuai dengan topik penelitian. Sedangkan kriteria eksklusi dalam penelitian ini sebagai berikut: artikel terbit diluar kurun waktu 5 tahun (diluar tahun 2017-2022), tipe dokumen bukan artikel, artikel tidak dapat diakses bebas, fokus dan desain penelitian diluar topik penelitian.

Tahap ketiga, yaitu eligibilitas atau penyesuaian data setelah proses identifikasi dan skrining dengan kriteria inklusi dan eksklusi untuk melakukan ekstraksi data, ekstraksi data ini dibuat berdasarkan pedoman PRISMA. Selanjutnya didapatkan 10 artikel yang keseluruhan sesuai dengan topik peneliti yang kemudian akan dianalisis lebih lanjut dalam pembahasan.

Selain itu, untuk memperdalam penelitian ini, peneliti juga mengambil data dari Dokumen RKPDP Kabupaten Ngawi Tahun 2021 dan Tahun 2022. Alasan pemilihan dokumen tersebut adalah bahwa dokumen tersebut memiliki rencana kerja dan landasan program pemerintah yang bekerja selama satu tahun yang artinya jika penelitian ini melihat kepada rencana kerja maka sama dengan melihat bagaimana pemerintah bekerja. Dengan melihat rincian informasi kebijakan dalam dokumen perencanaan, peneliti

dapat mengambil kesimpulan arah dari kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah terkait

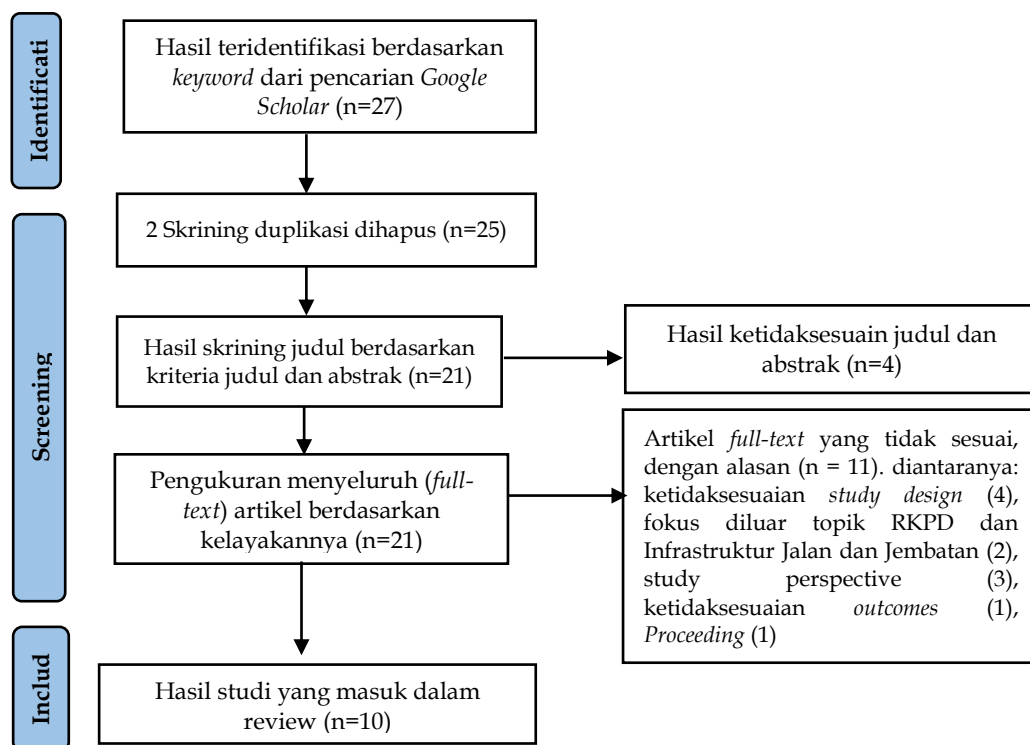
HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini berisi tentang hasil penelitian yang telah dilakukan berupa

1. Identifikasi dan karakteristik studi.

Terdapat 27 artikel yang didapat dari pencarian database elektronik. Dari proses skrining dilakukan pengurangan

atas 2 artikel yang sama, dan 4 artikel yang tidak memiliki kesesuaian judul dan abstrak dengan topik penelitian. Artikel lebih lanjut (n=21) dipertahankan untuk dilakukan penyesuaian *full-text*, kemudian didapatkan 10 artikel yang memenuhi kriteria inklusi dan 11 artikel dikeluarkan karena beberapa alasan. Gambar 1 mengilustrasikan detail strategi pencarian berdasarkan diagram alur PRISMA.



Gambar 1. Diagram alur PRISMA

Sumber : Data diolah peneliti, 2023

Temuan dalam 10 artikel berikut telah sesuai dengan topik penelitian dimana artikel berikut membahas terkait dengan rencana kerja pemerintah daerah dan infrastruktur jalan, jembatan. Terdapat contoh tinjauan sistematik literatur review yang mana eksplorasi dilakukan pada jumlah artikel yang cukup sedikit, sebagaimana dapat dilihat dalam Leonidou et al (2020), yang melakukan tinjauan literatur sistematis dari 26 studi di bidang keterlibatan pemangku kepentingan dalam

manajemen inovasi dan pengembangan kewirausahaan, selain itu studi Christofi et al (2017) menggunakan 32 artikel dalam tinjauan sistematik literatur mereka dalam fokus merger dan akuisisi domain. Berdasarkan beberapa studi tersebut, kami mendasarkan tinjauan literatur pada 10 sampel artikel. Temuan 10 ini berdasarkan riset yang sebelumnya telah dilakukan oleh peneliti terdahulu sehingga menghasilkan analisis yang mendalam di dalam penulisan ini sebagaimana tertuang dalam tabel 1.

Tabel 1. Rekapitulasi Artikel yang Dianalisis

No	Referensi dan Jurnal	Judul	Metode	Kategori Bahasan	Kesimpulan Temuan
1	(Yunasri, 2022), Jurnal Ilmiah Indonesia, Vol.7 No.8	Determinan Belanja Infrastruktur Jalan dan Jembatan pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Studi RKPD Provinsi Sumatera Barat)	Kuantitatif-deskriptif (Regresi linear berganda)	Determinan Belanja Infrastruktur Jalan dan Jembatan (Pengaruh PAD, Transfer Umum dan Pertumbuhan Ekonomi)	PAD berpengaruh positif dan signifikan, besaran PAD mempengaruhi keleluasaan pemerintah daerah dalam meningkatkan sarana prasarana dalam bidang infrastruktur baik itu jalan maupun jembatan DAU berpengaruh positif dan signifikan, semakin banyak penyesuaian dalam DAU maka pemerintah dapat leluasa mengalokasikannya pada pembangunan infrastruktur dan pelayanan masyarakat sesuai isu strategis masing-masing daerah Tidak berpengaruh, PDRB tidak mempengaruhi belanja infrastruktur jalan dan jembatan
2	(Tahwin, 2018), Jurnal Potensia, Vol.19 No.1	Sinergitas Rencana Kerja Pemerintah Daerah Dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Studi Pada Kabupaten Rembang)	Kualitatif-deskriptif	Sinergitas Program dalam RKPD dengan RPJMD Kabupaten Rembang	Terdapat 16% sinergitas program antara RKPD dengan RPJMD, kemudian program prioritas dan kebijakan umum dalam RKPD tidak sinergi dengan RPJMD Kabupaten Rembang
3	(Soliha, 2022), Jurnal Ekonomi, Koperasi & Kewirausahaan, Vol.11 No.1	Strategi Bappeda dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	Kualitatif-deskriptif	Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan (Strategi Bappeda, Pengaruh Infrastruktur wilayah terhadap pertumbuhan ekonomi)	Memperkuat sinergi pemerintah dengan CSR, mendorong kelembagaan jasa konstruksi, memperkuat program sinergi pemerintah dan masyarakat terkait infrastruktur Infrastruktur yang berkualitas meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah
4	(Heldan et al, 2021), Jurnal Kebijakan dan Pelayanan Publik, Vol.7 No.2	Efektivitas Implementasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Studi Kasus Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Metro)	Kualitatif-deskriptif	Efektivitas Implementasi Kebijakan berdasarkan RKPD Kota Metro	Dari hasil efektivitas sudah memenuhi 5T (tepat kebijakan, tepat pelaksanaan, tepat target, tepat lingkungan dan tepat proses). Namun kebijakan pembangunan tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur saja. Sementara faktor yang mempengaruhi yaitu komunikasi, struktur birokrasi, sumberdaya dan disposisi
5	(Fauziah & Juliprijanto, 2021), Jurnal Paradigma Multidisipliner, Vol.2 No.3	Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Jalan Dan Jembatan Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Magelang	Kuantitatif-deskriptif (Ordinary Least Square)	Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan terhadap PDRB	Kondisi panjang jalan berpengaruh terhadap pertumbuhan PDRB karena panjang jalan sangat penting bagi kelancaran kegiatan perekonomian suatu daerah Tersedianya infrastuktur jembatan belum tentu dapat meningkatkan pendapatan suatu wilayah
6	(Murti, 2021), Jurnal Ilmu	Koordinasi Badan Perencanaan Penelitian	Kualitatif-deskriptif	Koordinasi BP3D dalam	Koordinasi yang dilakukan sudah cukup baik dan sesuai

	Administrasi Publik, Vol 10, No.1	dan Pengembangan Daerah (BP3D) Kabupaten Boyolali dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah(RKPD)		penyusunan RKPD	tujuan mulai tahap persiapan sampai dengan penetapan RKPD, namun tingkat kootdinasi dengan stakeholder masih perlu ditingkatkan
7	(Utami, 2021), Journal of Public Administration and Sociology of Development	Implementasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2021	Kualitatif-deskriptif	Implementasi Musrenbang dalam penyusunan RKPD	Implementasi musrenbang belum dilaksanakan secara maksimal yang ditinjau dari aspek ukuran, sumber kebijakan, komunikasi, karakteristik pelaksanaan, kondisi sosial, ekonomi dan politiknya
8	(Widhiarso et al, 2017) STMIK GI MDP	Model Pengambilan Keputusan Kelompok Untuk Evaluasi Kelayakan Proyek Investasi/Belanja Teknologi Informasi Dan Komunikasi (Tik) Di Pemerintah Daerah (Studi Kasus : Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Rkpd) Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Musi Banyu Asin Dan Kota Pagar Alam	Kualitatif	Evaluasi RKPD dengan menggunakan studi kelayakan financial approach	Evaluasi dengan menggunakan skenario pengembangan system informasi penyuluh dalam pelaksanaan RKPD memiliki tingkat keberhasilan evaluasi yang lebih tinggi dan memungkinkan pengambil keputusan untuk mempertimbangkan model evaluasi
9	(Maramis et al, 2021), Jurnal Governance, Vol.1 No.1	Peran Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan (Bapelitbang) Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di Kabupaten Minahasa Utara	Kualitatif-deskriptif	Peran Bappelitbang dalam penyusunan RKPD	Bappelitbang berperan sebagai evaluator yang mengkaji program yang terdapat dalam RKPD bersama dengan akademisi berkaitan dengan keefektifan, kesesuaian, dan anggaran
10	(Husen & Barayanan, 2021), Jurnal Poros Ekonomi, Vol.10 No.1	Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Pelabuhan, Jalan Dan Jembatan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Maluku Utara	Kuantitatif-deskriptif (Regresi linear berganda)	Pengaruh Infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi	Berpengaruh positif, mendorong dan memudahkan kelancaran mobilisasi barang maupun orang dari dan ke Maluku Utara Berpengaruh positif, kondisi jalan yang baik memudahkan masyarakat dalam melakukan aktivitas ekonomi, Berpengaruh positif, pembangunan jembatan penghubung jalan darat memudahkan dan melancarkan aktivitas masyarakat di daerah terpencil

Sumber : Data Diolah Peneliti, 2023

2. Determinan Kualitas Infrastruktur Jalan dan Jembatan

Infrastruktur yang berkualitas mempengaruhi peningkatan perekonomian dalam suatu daerah, sebagaimana terkonfirmasi pada studi Fauziah & Juliprijanto (2021); Solihi

(2022); Husen & Barayanan (2021). Ketersediaan infrastruktur yang layak berpengaruh besar bagi peningkatan kualitas hidup dan kemakmuran masyarakat (Fauziah & Juliprijanto, 2021). Dengan kata lain bahwa prasarana penunjang berupa akses jalan yang memadai akan memberi daya tarik

bagi investor untuk menanamkan modalnya di daerah tersebut (Fauziah & Juliprijanto, 2021; Soliha, 2022; Husen & Barayanan, 2021).

Terdapat perbedaan kontribusi pada setiap jenis infrastruktur yang berbeda dari setiap wilayahnya, seperti halnya di 26 provinsi yang mana infrastruktur jalan untuk mencapai akses pendidikan dan layanan kesehatan, kemudian akses jaringan telepon memberikan kontribusi pada perekonomian di lokasi tersebut. Sementara itu infrastruktur berupa jaringan listrik memberikan kontribusi yang signifikan pada pendapatan per kapita masyarakat (Suriani & Keusuma, 2015; Soliha, 2022). Lebih lanjut apabila ketersediaan infrastruktur suatu daerah terbatas, maka pertumbuhan PDRB tidak berkembang (Susantono, 2013).

Selain itu indikator kelayakan dapat diukur dengan melihat apakah pembangunan telah berjalan secara efektif dan efisien sehingga dapat mencapai sasaran dari pembangunan daerah. Sementara itu untuk melihat sejauh mana keselarasan tersebut, turut menjadi perhatian terkait dengan sinergitas program antara RKPD dengan RPJMD, Tahwan (2018) menyimpulkan adanya ketidaksinergian program pada RKPD dengan penjabaran pada dokumen RPJMD di Kabupaten Rembang tahun 2006-2010 adapun beberapa faktor yang mempengaruhi kondisi tersebut yaitu adanya sharing pagu indikatif bagi setiap OPD sehingga mengharuskan pergantian skala prioritas pembangunan daerah yang tertuang dalam RKPD.

Selaras dengan kondisi tersebut, tidak hanya di Kabupaten Rembang, jika melihat lebih dalam pada kondisi RKPD Kabupaten Ngawi tahun 2022 pada tabel 1 terlihat bahwasanya terdapat penurunan jumlah jembatan dan jalan yang terbangun pada 2016-2020. Kondisi ini mengindikasikan perlunya optimalisasi oleh pemerintah Kabupaten Ngawi yang berfokus pada pembangunan infrastruktur. Adapun tujuan dari agenda tersebut secara

langsung telah ditindaklanjuti oleh Kabupaten Ngawi sebagai program prioritas pada dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2022.

Prioritas Kabupaten Ngawi di tahun 2022 lebih berfokus pada beberapa akses jalan seperti jalan desa, kabupaten dan nasional. Sementara terkait perbaikan jalan dan jembatan Pemerintah setempat lebih mengutamakan perbaikan pada: 1) jalan poros desa, 2) jalan yang menghubungkan dengan fasilitas kesehatan, pendidikan dan perekonomian yang sekaligus mendukung tercapainya peningkatan IPM di Kabupaten Ngawi, selanjutnya terkait dengan perbaikan jembatan difokuskan pada jembatan yang mengalami kerusakan sedang hingga berat. Kesesuaian program dalam RKPD ini sekaligus menentukan tahapan dalam mencapai arah kebijakan pembangunan daerah (Heldan et al, 2021).

3. Implementasi Musrenbang dalam Penentuan Prioritas Dokumen RKPD

Proses dalam penyusunan RKPD pada dasarnya didasarkan oleh penjarangan aspirasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang (Maramis *et al*, 2021). Musrenbang menjadi media yang mengakomodir pembahasan rencana program dan kegiatan prioritas yang terdiri dari akademisi, dunia usaha, komunitas, pemerintah dan masyarakat. Kajian Maramis et al (2021); Husen & Baranyanan (2021); Utami (2021) menggarisbawahi beberapa pentingnya pelaksanaan musrenbang dalam penyusunan RKPD ataupun perubahan RKPD sebagai berikut: (1) Menyepakati permasalahan dan prioritas pembangunan daerah, (2) penyelarasan program dan kegiatan Kabupaten/Kota sesuai dengan sasaran dan prioritas pembangunan provinsi melalui APBD provinsi, (3) klarifikasi program dan

kegiatan sebagai kewenangan bagi Kabupaten/Kota dengan program/kegiatan desa berdasarkan usulan musrenbang kecamatan yang sebelumnya telah dilakukan.

Dari segi prosesnya, penyusunan RKPD tidak terlepas dari beberapa pendekatan yang digunakan seperti pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, top-down dan bottom-up (Murti, 2021). Lebih lanjut kelima pendekatan ini hampir digunakan seluruhnya oleh Pemerintah Daerah di Indonesia, termasuk dalam hal ini adalah Kabupaten Ngawi. Pendekatan politis dalam penyusunan RKPD menekankan pada pembahasan bersama dengan anggota dewan DPRD terhadap penerjemahan visi misi dari Kepala Daerah dalam proses penyusunan rencana program (Widhiarso et al, 2017; Maramis et al, 2021; Husen & Baranyanan, 2021; Utami, 2021).

Sementara pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah dengan menjalin dan memperkuat kerjasama dengan akademisi untuk membantu dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Daerah. Keterlibatan stakeholder tersebut juga telah memenuhi pendekatan partisipatif yang tidak hanya dari akademisi saja namun, dunia usaha, komunitas, pemerintah dan masyarakat itu sendiri. Secara lebih lanjut penjabaran pendekatan top-down dan bottom-up dilaksanakan dengan menyelaraskan usulan dari Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi hingga Nasional.

Pentingnya musrenbang telah dibahas dalam beberapa studi, menariknya walaupun di Kabupaten Ngawi mempunyai kelompok Musrenbang Semesta Berencana, namun pada implementasinya Kabupaten Ngawi tidak membuka forum rapat dalam penyusunan perubahan RKPD, hal ini dilakukan untuk mengantisipasi

kekecewaan dari pihak-pihak yang berkepentingan karena keterbatasan anggaran daerah.

Oleh karena itu penentuan prioritas dalam dokumen RKPD di Kabupaten Ngawi berasal dari arahan Bupati yang kemudian disesuaikan dengan kegiatan dari OPD terkait pada bidang prioritas yang ditentukan, misalnya pada RKPD 2022 yang berfokus pada infrastruktur jalan dan jembatan dimana dinas PUPR Kabupaten Ngawi menjadi leading sector dalam mengampu program prioritas tersebut. Namun apabila terdapat penolakan dari dokumen perubahan RKPD tersebut, Pemerintah Kabupaten Ngawi mengantisipasi dengan membuka negosiasi secara tertulis berdasarkan disposisi Kepala Daerah.

Sementara itu untuk melihat kelayakan dan ketercapaian antara program prioritas dengan sasaran yang telah ditentukan, dilakukan evaluasi secara berkala. Penilaian evaluasi mengakomodir rencana dan prioritas pembangunan secara lebih spesifik (Widhiarso et al, 2017). Studi Widhiarso et al (2017) memaparkan penggunaan evaluasi dari segi kuantitatif dengan menggunakan Teknologi sebagai basis, hal ini digunakan untuk meminimalisir sisi subjektivitas pada evaluasi itu sendiri, dengan tidak melibatkan banyak pihak dalam proses penilaian evaluasinya.

Mendukung studi tersebut, implementasi dari evaluasi RKPD di Indonesia sudah memenuhi pemanfaatan TIK sebagaimana dimaksud oleh Widhiarso et al (2017). Dimana kontrol evaluasi yang berjalan saat ini sudah aplikatif dengan memanfaatkan aplikasi Sistem Monitoring Evaluasi Pembangunan (SMEP). Sistem ini turut mengatur transparansi anggaran Pemerintah Daerah, evaluasi berbasis aplikasi dilakukan secara berkala setiap tiga bulan sekali. Sehingga dalam satu

tahun dilaksanakan 4 kali monitoring evaluasi secara menyeluruh.

Evaluasi tidak serta merta menjadi solusi atas permasalahan yang dihadapi Pemerintah Daerah. Terdapat beberapa kendala yang dihadapi pemerintah Kabupaten Ngawi dalam pelaksanaan RKPD tahun 2022 diantaranya: (1) apabila turun Surat Edaran ditengah berjalannya RKPD, seperti munculnya SE terkait subsidi BBM bagi masyarakat miskin sebesar 2% disaat RKPD telah dilaksanakan, hal ini kemudian membuat beberapa OPD diambil pagu anggarannya untuk memenuhi kuota 2% tersebut. (2) tidak ada dana tambahan atau dana khusus untuk memenuhi 2% dari Surat Edaran terkait BBM, sehingga perlu penyesuaian kembali anggaran APBD pada RKPD Kabupaten Ngawi yang tengah berjalan. (3) keterbatasan anggaran dalam mewujudkan mekanisme penyusunan dokumen rencana pembangunan yang terintegrasi dan partisipatif.

KESIMPULAN

Tersedianya infrastruktur yang meningkat dapat mempercepat pembangunan di suatu daerah. Penyusunan pembangunan daerah harus berpedoman pada arah kebijakan pembangunan nasional, arah kebijakan pembangunan daerah yang tertuang dalam program prioritas dalam dokumen RKPD. Hasil dari penelitian ini menunjukkan determinan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan dipengaruhi oleh sinergitas program prioritas dalam penyusunan RKPD suatu daerah. Sementara implementasi musrenbang dalam penentuan prioritas dokumen RKPD di Kabupaten Ngawi tidak menggunakan forum musrenbang dalam menetapkan program prioritas daerahnya, tetapi berasal dari arahan Bupati yang kemudian disesuaikan dengan kegiatan dari OPD terkait sebagai leading sector.

Selain itu hasil dari penelitian ini turut menggarisbawahi yangmana untuk menjamin ketercapaian program dan sasaran dilakukanlah evaluasi secara berkala menggunakan aplikasi SMEP. Selain itu untuk meminimalisir kendala dan memperkuat RKPD sebagai basis yang memperkuat sebuah kebijakan, peneliti menyarankan agar kondusifitas dan koordinasi antara legislatif dengan eksekutif di daerah perlu ditingkatkan untuk mempermudah koordinasi dan mempercepat persetujuan dewan apabila terjadi permasalahan ditengah berlangsungnya rencana kerja sesuai dengan RKPD yang telah ditetapkan.

SARAN

Penelitian ini hanya menggunakan satu daerah sebagai objek dalam penelitian ini, walaupun analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *systematic literature review* tetapi akan lebih mendalam apabila hasil dari SLR dilakukan komparasi dengan beberapa lokasi yang berbeda. Sehingga masih diperlukan penelitian lanjutan dengan menggunakan pendekatan yang berbeda baik kuantitatif maupun kualitatif dengan mempertimbangkan variabel dan indikator pada dokumen perencanaan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Susantono, B. 2013. *Transportasi & Investasi: Tantangan dan Perspektif Multidimensi*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Baum-Snow, N., Turner, M. 2017. Transport Infrastructure and the Decentralization of Cities in the People's Republic of China. *Asian Development Review*. Volume 34 Nomer 2. Halaman 25-50.
- Fauziah, D. R., Juliprianto, W. 2021. The Influence of Infrastructure Development on The Gross Regional Domestic Product (GRDP) Of Magelang Regency.

- Jurnal Paradigma Multidisipliner*, Volume 2 Nomer 3.
- Gibbons, S., Lyytikainen, T., Overman, H. G., Sanchis-Guarner, R. 2019. New road infrastructure: The effects on firms. *Journal of Urban Economics*, Volume 110. Halaman 35-50.
- Hadi, P.L., Wasanta, T., Santosa, W. 2021. Pengaruh Indeks Infrastruktur Jalan terhadap Indikator Ekonomi di Indonesia. *Jurnal HPJI*, Volume 7 Nomer 2. Halaman 143-152
- Heldan, E., Malik, M., Prarito, A.M. 2021. Efektivitas Implementasi Kebijakan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Studi Kasus Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Metro). *Jurnal Kebijakan dan Pelayanan Publik*, Volume 7 No. 2.
- Husen, A., Baranyanan, A. S. 2021. Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Pelabuhan, Infrastruktur Jalan dan Infrastruktur Jembatan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Maluku Utara. *Jurnal Poros Ekonomi*, Volume 10 Nomer 1.
- Maramis, A.P.P.M., Nayoan, H., Waworundeng, W. 2021. Peran Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan (Bapelitbang) Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Governance*, Volume 1 Nomer 1.
- Murti, K.I. 2021. Koordinasi Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP3D) Kabupaten Boyolali dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, Volume 10 Nomer 1.
- Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., Shamseer, L., Tetzlaff, J. M. 2021. The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. *In the BMJ Publishing Group*. Halaman 372.
- Selcuk, A. A. 2019. A Guide for Systematic Reviews: PRISMA. *Turkish Archives of Otorhinolaryngology*, Volume 57 Nomer 1. Halaman 57-58.
- Soliha, W. 2022. Strategi Badan Perencanaan Daerah dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Ekonomi, Koperasi & Kewirausahaan*, Volume 11 Nomer 1.
- Tahwin, M. 2018. Sinergitas Rencana Kerja Pemerintah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Studi Pada Kabupaten Rembang). *Jurnal Potensia*, Volume 19 Nomer 1.
- Utami, D.F. 2021. Implementasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2021. *Journal of Public Administration and Sociology of Development*, Volume 2 Nomer 1.
- Widhiarso, W., Hartati, S., Wardoyo, R. 2021. Model Pengambilan Keputusan Kelompok untuk Evaluasi Kelayakan Proyek Investasi/Belanja Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Pemerintah Daerah (Studi Kasus: Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKDP). *STMIK GI MDP*
- Yunasri. 2022. Determinan Belanja Infrastruktur Jalan dan Jembatan Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Ilmiah Indonesia*, Volume 7 Nomer 8.
- Xiao, Y., Watson, M. 2019. Guidance on Conducting a Systematic Literature Review. *Journal of Planning Education and Research*, Volume 39 Nomer 1. Halaman 93-112.